



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2016**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJ IP) TAHUN 2015**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015. LKj IP Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKj IP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj IP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan penyusunan LKj IP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Demikian LKj IP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semarang, Februari 2016

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Ir. LALU M. SYAFRIADI, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610707 199003 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
C. Isu Strategis	11
D. Sistematika Penulisan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. RPJMD Tahun 2013 - 2018	13
B. Renstra DKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018	15
C. Perjanjian Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014	
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Analisa Capaian Kinerja	26
C. Akuntabilitas Keuangan	46
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	49
B. Saran	51
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	7
Tabel 2.1. Rumusan Misi Dinlutkan Tahun 2013-2018	16
Tabel 2.2. Visi Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran dan Target Capaian Sasaran	19
Tabel 3.1. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	23
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015	24
Tabel 3.3. Capaian Indikator Sasaran 1	27
Tabel 3.4. Capaian Indikator Sasaran 2	30
Tabel 3.5. Capaian Indikator Sasaran 3	32
Tabel 3.6. Capaian Indikator Sasaran 4	36
Tabel 3.7. Capaian Indikator Sasaran 5	40
Tabel 3.8. Capaian Indikator Sasaran 6	43
Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Sasaran	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	5
Gambar 1.2. Bagan Organisasi UPTD Laboratorium Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP)	6
Gambar 1.3. Bagan Organisasi UPTD Laboratorium Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)	6
Gambar 1.4. Bagan Organisasi UPTD Balai Pembenihan dan Budidaya Ikan (BPBI Air Tawar dan Air Payau)	6
Gambar 1.5. Bagan Organisasi UPTD Balai Karantina dan Kesehatan Ikan (BKKI)	7
Gambar 1.6. Tampilan Website Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	11

RINGKASAN EKSEKUTIF

LKjIP merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman penyusunan LKjIP yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menetapkan 6 sasaran strategis dengan 14 indikator kinerja. Realisasi capaian indikator pada masing-masing sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran 1 Tercapainya peningkatan pendapatan petani garam, wanita pesisir dan taruna pesisir dicapai 158,38%;
2. Sasaran 2 Menurunnya jumlah pelanggaran peraturan kelautan dan perikanan dan meningkatnya peran serta masyarakat pengawas dalam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dicapai 107,50%.
3. Sasaran 3 Meningkatnya jumlah produksi perikanan tangkap dan tercapainya peningkatan pendapatan nelayan dicapai 122,71%.
4. Sasaran 4 Meningkatnya jumlah produksi perikanan budidaya dan tercapainya peningkatan pendapatan pembudidaya ikan dicapai 142,24%
5. Sasaran 5 Meningkatnya jumlah dan ragam produk olahan yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta ekspor produk perikanan dan tercapainya peningkatan angka konsumsi makan ikan di Jawa Tengah dicapai 115,15%.
6. Sasaran 6 Meningkatnya upaya pencegahan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dicapai 145,68%.

Secara umum semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **sangat baik** dengan rata-rata capaian keseluruhan indikator sebesar 131,94%. Dari 14 indikator dalam 6 sasaran tersebut, sebanyak 12 indikator kinerja berpredikat **sangat baik**, sedangkan 2 indikator berpredikat **baik**.

Keberhasilan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja di atas diiringi dengan berbagai prestasi tingkat nasional sebagai Juara Umum Adibakti Mina Bahari 2015. Berbagai kategori juara bidang pembangunan kelautan dan perikanan diraih oleh Jawa Tengah antara lain :

1. Juara 1 Adibakti Mina Bahari 2015 Kategori Pokdakan Nila/Mas/Gurame Kabupaten Banyumas (Ulam Sari);
2. Juara 1 Adibakti Mina Bahari Pelopor 2015 Kategori Pendamping Permodalan Perikanan Tangkap Teladan -Mitra Usaha Perikanan Tangkap- (Abdul Jamil);
3. Juara 1 Adibakti Mina Bahari Pelopor 2015 Kategori Perbankan Teladan -Mitra Usaha Perikanan Tangkap- (BRI Cabang Brebes);
4. Juara 1 Adibakti Mina Bahari Pelopor 2015 Kategori Pelabuhan Perikanan Teladan (PPP Morodemak);
5. Juara 1 Adibakti Mina Bahari 2015 Kategori Pokdakan Udang Kabupaten Purworejo (Mina Loka Jaya);
6. Juara 1 Adibakti Mina Bahari 2015 Kategori Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT) Kabupaten Banyumas (Wijaya Kusuma);
7. Juara 1 Adibakti Mina Bahari 2015 Kategori Kelembagaan Posikandu Kabupaten Pati (DKP Pati);
8. Juara 1 Adibakti Mina Bahari 2015 Kategori UKM Pengolahan Hasil Perikanan Terbaik Kategori Skala Kecil Kabupaten Brebes (Murwati Murwat (Mutiar Gading));
9. Juara 1 Adibakti Mina Bahari 2015 Kategori Pemerintah Daerah Pendukung Pengembangan SDM KP (Hj. Siti Masita S);
10. Juara 1 Adibakti Mina Bahari 2015 Kategori Perikanan Mandiri Terbaik (Hadis).
11. Juara 2 Adibakti Mina Bahari 2015 Kategori Kelembagaan Unit Pelayanan Pengembangan Kabupaten Grobogan (Mitra Usaha Mina);
12. Juara 2 Adibakti Mina Bahari 2015 Kategori Pokdakan Nila/Mas/Gurame Kabupaten Temanggung (Mina Papilion);
13. Juara 2 Adibakti Mina Bahari 2015 Kategori Pokdakan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Kabupaten Banyumas (Pamuji Inggil);
14. Juara 2 Adibakti Mina Bahari 2015 Kategori Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) Kabupaten Kendal (Desa Wonorejo);
15. Juara 3 Adibakti Mina Bahari 2015 Kategori Wirausaha Perikanan Tangkap Teladan Kabupaten Batang (H. Nur Abadi);
16. Juara 3 Adibakti Mina Bahari 2015 Kategori Pokdakan Rumput Laut Kabupaten Brebes (Kali Crucuk);

17. Adibakti Mina Bahari 2015 Kategori Gemarikan-Restoran/ Rumah Makan (Restoran Gulai Kepala Ikan 'Mas Agus' Solo);
18. Juara 3 Adibakti Mina Bahari 2015 Kategori Konsultan Keuangan Mitra Bank Sektor Kelautan dan Perikanan Teladan (Adi Nugroho).

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Konsep *goodgovernance* atau tata pemerintahan yang baik memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan yang demokratis, pemerintahan yang menekankan pada kesetaraan antara lembaga lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah, sektor swasta dan masyarakat. Dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*goodgovernance*) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Akuntabilitas akan mendorong setiap aparat pemerintahan daerah untuk melaksanakan setiap tugasnya dengan cara yang terbaik bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan didaerahnya. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik atau masyarakat adalah suatu ukuran yang menunjuk pada seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki *stake holder*.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta

pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan penyusunan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan acuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, penyusunan LkjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada indikator kinerja yang ada yang ditetapkan lewat tujuan dan sasaran yang direncanakan. Realisasi dan dilaporkan dalam LKjIP ini adalah realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disusun pada Tahun 2015.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Pergub No. 80 tahun 2008 Tentang penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, maka tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan;
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang kelautan dan perikanan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;

4. Pelaksanaan tugas di bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha kelautan dan perikanan;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menunjang pencapaian tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ditopang oleh struktur/susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

Sekretariat membawahkan:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, membawahkan:

- a. Seksi Bina Pesisir Laut dan Pulau-pulau Kecil;
- b. Seksi Konservasi, Pengendalian Ekosistem dan Sumberdaya Kelautan;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Jasa Kelautan.

4. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap membawahkan:

- a. Seksi Prasarana Perikanan Tangkap;
- b. Seksi Sarana Perikanan Tangkap;
- c. Seksi Pengawasan dan Pengelolaan Sumber daya Ikan.

5. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya membawahkan:

- a. Seksi Pengelolaan Budidaya Air Tawar;
- b. Seksi Pengelolaan Budidaya Air Payau dan Laut;
- c. Seksi Pengelolaan Sumber daya Perikanan Budidaya.

6. Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan

Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan membawahkan:

1. Seksi Pelayanan Usaha Perikanan;
2. Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran;
3. Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan.

7. UPTD- LPPMHP

UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

- a. Laboratorium Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Semarang;
- b. Laboratorium Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Pekalongan; dan
- c. Laboratorium Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Cilacap.

8. UPTD-PPP

Unit Pelaksana Teknis - PPP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

- a. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari Kota Tegal;
 - Satker PPP Pasir Kebumen
- b. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bajomulyo Kab. Pati;
- c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Morodemak Kab. Demak;
- d. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Wonokerto Kab. Pekalongan;
- e. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Asemdayong Kab. Pemalang;
- f. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Klidang Lor Kab. Batang;
- g. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung Kab. Rembang;
- h. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tawang Kab. Kendal; dan
- i. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Karimunjawa Kab. Jepara.

9. UPTD-Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan (BBI)

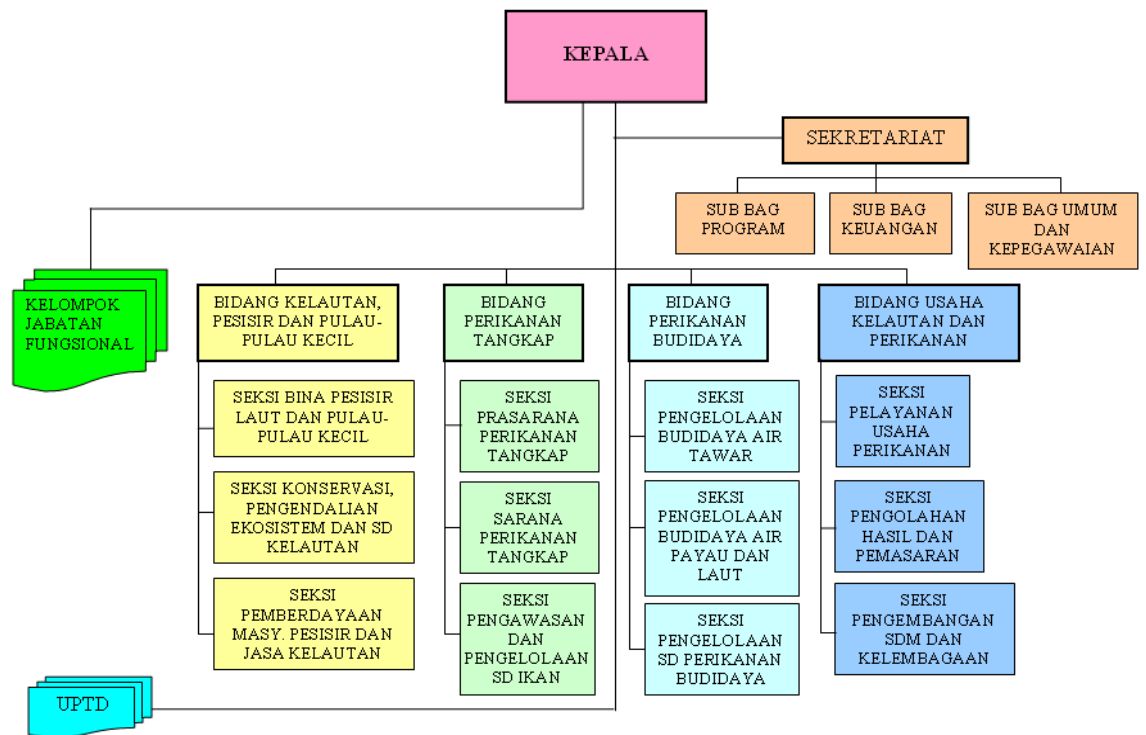
Unit Pelaksana Teknis-BBI Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

- a. Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar
 - Satker Satker BIAT Ambarawa
 - Satker BIAT Janti

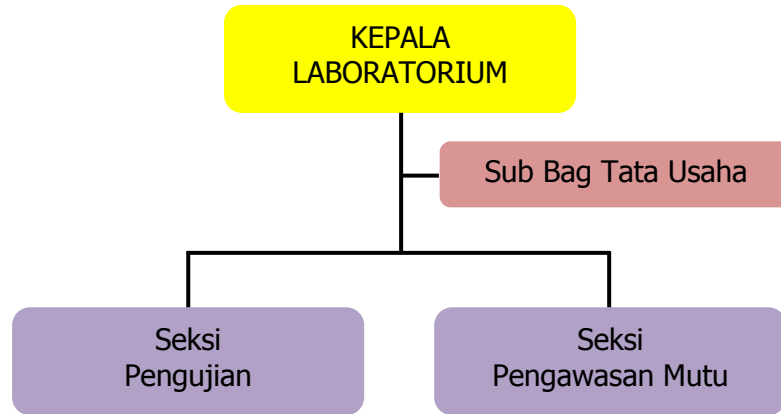
- Satker BIAT Ngrajek
 - Satker BIAT Tambaksogra
 - Satker BIAT Randudongkal
 - Satker BIAT Singosari
- b. Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau dan Laut
- Satker BIAP Tugu
 - Satker BIAP Sluke
 - Satker BIAP Karimunjawa

10. Balai Karantina dan Kesehatan Ikan

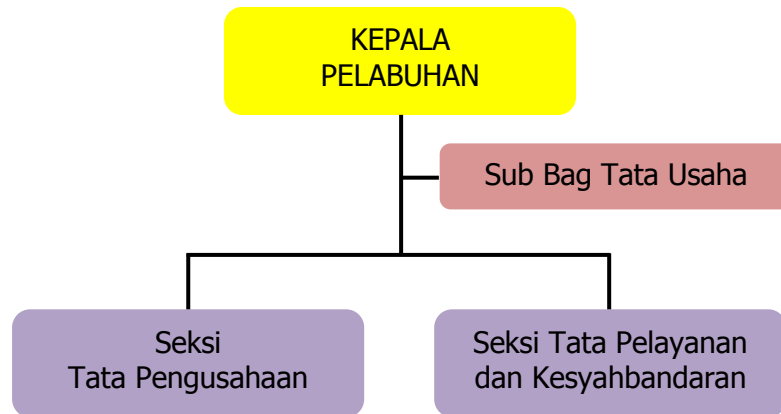
11. Kelompok Jabatan Fungsional



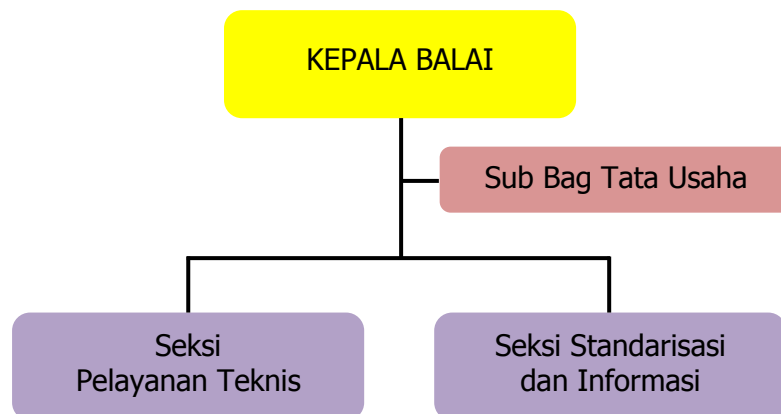
Gambar 1.1. Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



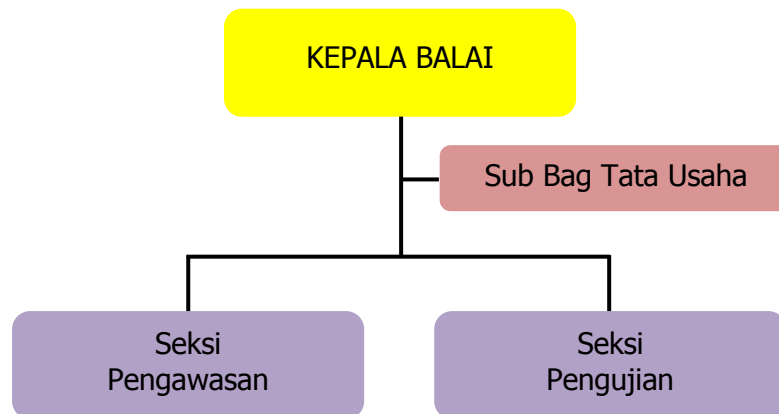
Gambar 1.2. Bagan Organisasi UPTD Laboratorium Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP)



Gambar 1.3. Bagan Organisasi UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)



Gambar 1.4. Bagan Organisasi UPTD Balai Pembenihan dan Budidaya Ikan (BPBI Air Tawar dan Air Payau)



Gambar 1.5. Bagan Organisasi UPTD Balai Karantina dan Kesehatan Ikan (BKKI)

Jumlah Pegawai

Pada tahun 2015 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah pegawai sebanyak 333 orang dengan jumlah pejabat struktural sebanyak 81 orang. Sejumlah pegawai tersebut tersebar di seluruh bidang dan UPTD dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Aset/Modal

Sarana dan prasarana penunjang kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah secara bertahap terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. hingga Januari 2015, secara umum prasarana kerja berupa gedung perkantoran yang sudah milik sendiri antara lain; balai budidaya, laboratorium, mobil laboratorium keliling dan mobil Gemarikan.

Tabel 1. Sarana dan Prasarana penunjang kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

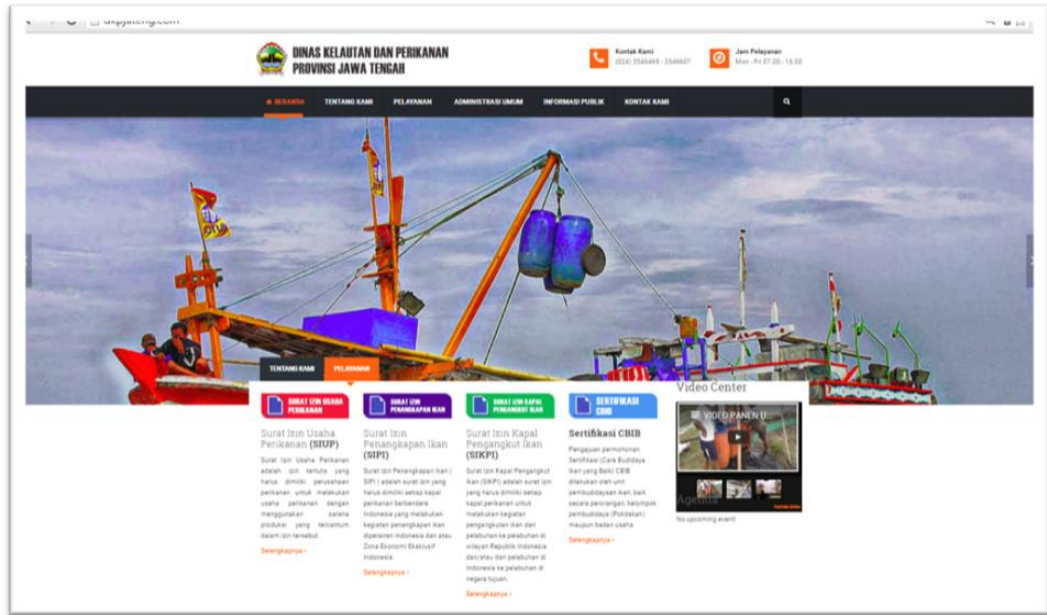
No	Gedung	Alamat	Luas Lahan (termasuk bangunan)
1	Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Jl. Imam Bonjol No. 134 Kota Semarang, 50132 Telp. (024) 3546469, 3546607 Fax. (024) 3551289	Luas Tanah : 5.793,96 Luas Bangunan : 1.919,95
2	Laboratorium Pengujian dan	Jl. Siliwangi No. 636 Kota Semarang	Luas Tanah : 2320 m ² Luas Bangunan :

No	Gedung	Alamat	Luas Lahan (termasuk bangunan)
	Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Semarang	Telp. (024)7605311,7623231 Fax. (024) 7605311	540m ²
3	Laboratorium Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Pekalongan	Jl. Pantaisari II Panjang Wetan Pekalongan Telp. (0285) 421675	Luas Tanah: 2000 m ² Luas Bangunan: 417,24 m ²
4	Laboratorium Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Cilacap	Jl. Dr. Rajiman No.13 Cilacap, Telp. (0282) 542674	Luas Tanah: 1150 m ² Luas Bangunan: 530 m ²
5	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari Kota Tegal	Pelabuhan Peri, Jl. Blanak No.10C Kota Tegal Telp. (0283) 358787	Luas Tanah: 162.299 m ² Luas Bangunan: 4.802 m ²
6	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Asemtoyong Kab. Pemalang	Desa Asemtoyong Kec. Taman Kab. Pemalang Telp. (0248) 3278421	Luas Tanah : 5780 m ² Luas Bangunan : 204 m ²
7	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Wonokerto Kab. Pekalongan	Desa Tratebang, Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan	Luas Tanah : 13.935 m ² Luas Bangunan : 3243 m ²
8	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Klidang Lor Kab. Batang	Jl. Yos Sudarso Utara, Boom Batang Telp. (0285) 391283	Luas Tanah : 88559 m ² Luas Bangunan : 6704m ²
9	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tawang Kab. Kendal	Desa Gempol Sewu Kec. Rowosari Kab. Kendal Telp. (0294) 3645668	Luas Tanah : 1300 m ² Luas Bangunan : 792 m ²
10	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Morodemak Kab. Demak	Dukuh Kongsu Desa Purworejo Kec Bonang Kab. Demak Telp. (0291) 3406224	Luas Tanah : 3900 m ² Luas Bangunan : 770 m ²
11	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Karimunjawa Kab. Jepara	Tanjung Banteng, Desa/Pulau Karimunjawa Kab. Jepara	Luas Tanah : 12730 m ² Luas Bangunan : 1313m ²

No	Gedung	Alamat	Luas Lahan (termasuk bangunan)
12	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bajomulyo Kab. Pati	Jl. Panglima Sudirman No. 12A Desa Bajomulyo Kec Juwana Kab. Pati Telp (0295) 381689	Luas Tanah : m ² Luas Bangunan : 2200m ²
13	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung Kab. Rembang	Jl. Dorang No. 1 Kec. Rembang Kab. Rembang Telp (0295) 691094	Luas Tanah : 8200 m ² Luas Bangunan : 6099m ²
14	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar (BPBIAT) Muntilan Kab. Magelang	Jl. Kerkop No.1 Kec. Muntilan Kab. Magelang Telp. (0293) 587022	Luas Kolam keseluruhan: ±15.000 m ² ; Luas Bangunan 1.638 m ²
15	Satker Perbenihan Budidaya Air Tawar (PBIAT) Ngrajek Kab. Magelang	Jl. Mayor Kusen (Jl Raya Borobudur) Km. 4, DEsa Ngrajek, Kec. Mungkid, Kab. Magelang Telp. (0293) 788306	Luas Kolam : ±35.000 m ² , Luas Bangunan: ±100 m ²
16	Satker Perbenihan Budidaya Air Tawar (PBIAT) Janti Kab. Klaten	Desa Janti Kec. Polanharjo Kab Magelang. Telp/Fax (0272) 552947	Luas kolam 1.700 m ² , Luas bangunan dan ruang terbuka: 98 m ² , saluran: 21 m ²
17	Satker Perbenihan Budidaya Air Tawar (PBIAT) Ambarawa Kab. Semarang	Desa Pojok Sari, Kec. Ambarawa, Kab Semarang	Luas tanah : 9.510 m ² , Luas bangunan : 965 m ²
18	Satker Perbenihan Budidaya Air Tawar (PBIAT) Tambaksogra Kab. Banyumas	Desa Tambaksogra Kec. Sumbang Kab. Banyumas	Luas Tanah : 20.000 m ² ; Luas Bangunan : 783 m ² ; Luas Kolam : 10.680 m ²
19	Satker Perbenihan Budidaya Air Tawar (PBIAT) Randudongkal Kab. Pemalang	Desa Banjaranyar KEc. Randudongkal Kab. Pemalang	Luas Tanah : ± 1 Ha; Luas Bangunan : 160 m ² ; Luas Kolam : 3.308 m ²
20	Satker Perbenihan Budidaya Air Tawar (PBIAT) Singosari Kab. Banyumas	Desa Singosari Kec. Karanglewas Kab. Banyumas	Luas Tanah : 2 Ha; Luas Bangunan -; Luas Kolam : -

No	Gedung	Alamat	Luas Lahan (termasuk bangunan)
21	Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Maribaya Kab. Tegal	Jl. Beringin Raya Km. 10 Desa Maribaya Kec. Kramat Kab. Tegal Telp (0283) 3335709	Luas tanah : 40.000 m ² , Luas bangunan : 350 m ² Luas Tambak : 350.000 m ²
22	Satker Perbenihan Ikan Air Payau Tugu Kota Semarang	Karanganyar, Kec. Tugu Kota Semarang	Luas tanah : 43.066 m ² , Luas bangunan : 462 m ²
23	Satker Perbenihan Ikan Air Payau Sluke Kab. Rembang	Desa Jatisari Kec. Sluke Kab. Rembang	Luas tanah : 5.751 m ² , Luas bangunan : 384 m ² Luas Tambak : -
24	Satker Perbenihan Ikan Air Payau Karimunjawa Kab. Jepara	Pulau Karimunjawa, Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara	Luas tanah : 10.000 m ² , Luas bangunan : 150 m ²
25	Balai Karantina dan Kesehatan Ikan Semarang	Jl. Mpu Tantular No.2 Kota Semarang Telp. (024) 3514838	Luas tanah : 692 m ² , Luas bangunan : 349 m ²

Sarana kerja penunjang lain yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah berupa sarana informasi portal berupa website dengan alamat akses <http://dkp.jatengprov.go.id> dan Email: diskanlutjateng@yahoo.com. Sarana informasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 1.6. Tampilan Website Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

C. ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan TUPOKSI pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah; telaah Renstra Kementerian Kelautan; dan telaah RTRW dan KLHS Jawa Tengah, maka berikut ini adalah isu-isu strategis yang telah ditetapkan :

1. Kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi perikanan (tangkap dan budidaya), sistem distribusi dan jaminan keamanan pangan;
2. Peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan;
3. Tingkat konsumsi ikan di Jawa Tengah masih dibawah rata-rata nasional;
4. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan tangkap dan budidaya;
5. Daya dukung ekosistem perairan yang berimbas pada penurunan produksi perikanan;
6. Pengelolaan sumberdaya ikan di Jawa Tengah.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian dan penulisan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN** : Menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, isu strategis serta sistematika penyajian
- BAB II PERENCANAAN KINERJA** : Menjelaskan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis termasuk di dalamnya visi-misi, tujuan dan sasaran strategis dan perjanjian kinerja
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA** : Menjelaskan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja
- BAB IV PENUTUP** : Menjelaskan kesimpulan dan saran-saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RPJMD TAHUN 2013-2018

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah 2013 – 2018 sebagai penjabaran Visi Misi Gubernur Terpilih dan mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan nasional, juga merupakan Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Sebagaimana tertuang pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, Visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 adalah :

MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI
“Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Sejahtera

Jawa Tengah Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar rakyat Jawa Tengah yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian dan tepo seliro; serta tersedia prasarana dan sarana publik terkait dengan supra dan infrastruktur pelayanan publik, transportasi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Berdikari

Berdikari merupakan tindakan yang didasarkan pada kekuatan sendiri atau berposisi berdiri di atas kaki sendiri. Artinya membangun Jawa Tengah berdasarkan kekuatan yang ada di Jawa Tengah dan mengeksplorasi seluruh potensi yang dapat digunakan, baik di Jawa Tengah, Nasional, maupun Internasional. Untuk laku kerjanya, berdaulat dalam kemitraan dengan para pihak, menjadi sendi gerak kerja bersama yang saling menghormati.

Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” merupakan instrumen untuk menciptakan nilai-nilai kesejahteraan yang setara (equal) bagi segenap komponen masyarakat Jawa Tengah dan mewujudkan kondisi Jawa Tengah yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya, yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk sikap maupun perbuatan, dengan tindakan dan perilaku “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

Sesuai dengan harapan “Jawa Tengah Yang Sejahtera dan Berdikari”, maka ditetapkan “Misi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2013-2018” sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut:

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno – Berdaulat dibidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan, “mboten korupsi, mboten ngapusi”;
4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan;
5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;

6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 -2018 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sehingga diperlukan sinergitas dan keterkaitan antara Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dengan Visi-Misi Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

B. RENSTRA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 - 2018

Visi

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu organisasi pemerintah di Jawa Tengah, dalam rangka melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai visi, yaitu :

“Terwujudnya Sektor Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah yang Tangguh, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan.”

Penjelasan Visi :

Tangguh,

meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan melalui peningkatan pendapatan dan penguatan kelembagaan pemerintah sektor kelautan dan perikanan.

Mandiri,

Mengandung arti bahwa sektor Kelautan dan Perikanan di Jawa Tengah diharapkan mampu mendukung kedaulatan pangan melalui melalui peningkatan produksi, sistem distribusi dan jaminan keamanan pangan yang berasal dari sumberdaya ikan.

Berdaya Saing,

Mengandung arti bahwa sektor Kelautan dan Perikanan di Jawa Tengah diharapkan mampu menghasilkan produk dan jasa dengan daya saing tinggi, mempunyai nilai tambah (*value added*) dan keunggulan komparatif (*comparative advantage*).

Berkelanjutan,

Mengandung arti bahwa dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Jawa Tengah akan tetap memperhatikan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang serta menghindari rusaknya sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah dijelaskan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mempunyai Misi yang dirumuskan dalam tabel 2.

Tabel 2.1. Rumusan Misi Dinlutkan Tahun 2013-2018

Visi	Kode Misi	Misi
V-01 (TANGGUH)	M1	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan dan pembudidaya ikan.
	M2	Penguatan Kelembagaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
V-02 (MANDIRI)	M3	Mewujudkan peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya
	M4	Mewujudkan perbaikan sistem distribusi dan jaminan keamanan pangan yang berasal dari sumberdaya ikan
V-03 (BERDAYA SAING)	M5	Mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, berdaya saing serta memiliki nilai tambah.
	M6	Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan
	M7	Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan.
V-04 (BERKE-LANJUTAN)	M8	Mewujudkan peningkatan daya dukung lahan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
	M9	Mewujudkan kelembagaan masyarakat pengawas yang berperan dalam kegiatan pengawasan.

Berikut ini adalah uraian penjelasan dan arahan dari tiap-tiap misi :

Misi ke-1: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan dan pembudidaya ikan.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan ketangguhan ekonomi masyarakat pesisir, nelayan dan pembudidaya ikan di Jawa Tengah melalui peningkatan kesejahteraan dalam upaya mendukung kemandirian ekonomi.

Misi ke-2: Penguatan Kelembagaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di Jawa Tengah.

Misi ke-3: Mewujudkan peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan pangan masyarakat Jawa Tengah melalui peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya dalam upaya mendukung kedaulatan pangan.

Misi ke-4: Mewujudkan perbaikan sistem distribusi dan jaminan keamanan pangan yang berasal dari sumberdaya ikan

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan upaya perbaikan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian guna memperoleh hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Misi ke-5: Mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, berdaya saing serta memiliki nilai tambah.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi produk dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Disamping itu, produk kelautan dan perikanan harus mampu bersaing dengan produk impor dan memperoleh posisi dalam pasar internasional.

Misi ke-6: Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di Jawa Tengah.

Misi ke-7: Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana di 19 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah dalam menunjang pelayanan terhadap nelayan, pembudidaya ikan serta pengolah dan pemasar produk hasil perikanan yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Jawa Tengah.

Misi ke-8: Mewujudkan peningkatan daya dukung lahan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

Misi ini diarahkan untuk menjaga kelestarian dalam mengeksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan Jawa Tengah dengan tetap memperhatikan kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang serta menghindari rusaknya sumberdaya laut dan perairan umum.

Misi ke-9: Mewujudkan kelembagaan masyarakat pengawas yang berperan dalam kegiatan pengawasan

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat pengawas (POKMASWAS) dalam kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Jawa Tengah.

Tabel 2.2. Visi Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran dan Target Capaian Sasaran

No	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Sasaran				
						Tahun-2014	Tahun-2015	Tahun-2016	Tahun-2017	Tahun-2018
1	V-01 (Tangguh)	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir, nelayan dan pembudidaya ikan. (M1)	Meningkatkan kesejahteraan nelayan (TM1-01)	Meningkatnya pendapatan nelayan	Peningkatan pendapatan nelayan (sat : Rp/Kap/Th)	11.566.477,04	12.546.157,65	13.608.817,2	14.761.484,02	16.011.781,71
			Meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan (TM1-02)	Meningkatnya pendapatan pembudidaya ikan	Peningkatan pembudidaya ikan (sat : Rp/Kap/Th)	16.339.722,53	17.298.864,23	18.314.307,57	19.389.357,42	20.527.512,71
			Meningkatkan kesejahteraan petani garam, taruna pesisir dan wanita pesisir (TM1-03)	Meningkatnya pendapatan petani garam	Peningkatan Pendapatan petani garam (sat : Rp/Kap/Th)	14.893.425,65	16.963.611,81	19.321.553,85	22.007.249,84	25.066.257,56
				Meningkatnya pendapatan taruna pesisir	Peningkatan Pendapatan taruna pesisir (sat : Rp/Kap/Th)	4.300.805,82	4.475.418,54	4.657.120,53	4.846.199,62	5.042.955,33
				Meningkatnya pendapatan wanita pesisir	Peningkatan Pendapatan wanita pesisir (sat : Rp/Kap/Th)	2.849.926,73	2.961.073,87	3.076.555,75	3.196.541,43	3.321.206,54

Tabel 2.2. Visi Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran dan Target Capaian Sasaran

No	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Sasaran				
						Tahun-2014	Tahun-2015	Tahun-2016	Tahun-2017	Tahun-2018
2	V-02 (Mandiri)	Mewujudkan peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya (M3)	Meningkatkan jumlah produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya (TM3-01)	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap (sat: Ton)	296.663,00	306.868,21	317.424,48	328.343,88	339.638,91
				Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya (sat : ton)	288.084,05	309.949,63	333.474,81	358.785,54	386.017,37
3	V-03 (Berdaya Saing)	Mewujudkan perbaikan sistem distribusi dan jaminan keamanan pangan yang berasal dari sumberdaya ikan. (M4)	Meningkatkan ketersediaan protein hewani yang berasal dari sumberdaya ikan (TM4-01)	Meningkatnya konsumsi makan ikan di Jawa Tengah	Peningkatan konsumsi makan ikan di Jawa Tengah (sat : kg/kap/th)	18,69	19,59	20,55	21,55	22,59
		Mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan berdaya saing serta memiliki nilai tambah. (M5)	Meningkatkan jumlah dan ragam produk olahan yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta ekspor produk perikanan (TM5-01)	Meningkatnya volume ekspor produk dan nilai ekspor produk hasil perikanan	Peningkatan volume ekspor (sat: ton)	25.093,46	25.770,99	26.466,80	27.181,41	27.915,31

Tabel 2.2. Visi Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran dan Target Capaian Sasaran

No	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Sasaran				
						Tahun-2014	Tahun-2015	Tahun-2016	Tahun-2017	Tahun-2018
4	V-04 (Berkelanjutan)	Mewujudkan peningkatan daya dukung lahan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. (M8)	Mencegah kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (TM8-02)	Terlaksananya pencegahan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Luas Mangrove di Kawasan Perikanan	7,50	8,13	8,25	8,38	8,50
					Luas Terumbu Karang Buatan	4,68	5,13	5,58	6,03	6,48
		Mewujudkan kelembagaan masyarakat pengawas yang berperan dalam kegiatan pengawasan. (M9)	Meningkatkan peran masyarakat pengawas dlm kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (TM9-01)	Terlaksananya pembinaan masyarakat pengawas dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Jumlah kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan yang aktif (sat : kelompok)	20	20	20	20	20
		Meningkatkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta penegakkan peraturan kelautan dan perikanan (TM9-02)	Terlaksananya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta penegakkan peraturan kelautan dan perikanan	Operasi Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta penegakkan peraturan kelautan dan perikanan (sat : kali)	10	10	10	10	10	

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2015 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 11 program meliputi 91 kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 sebesar Rp.58.042.032.000,00 dan APBN Tahun 2015 sebesar Rp.20.313.693.000. Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Tahun 2015, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1 .

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2015, Dinas Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, terdapat 6 sasaran strategis dan 14 indikator kinerja yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2015			Realisasi Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
		Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran 1						
Tercapainya peningkatan pendapatan petani garam, wanita pesisir dan taruna pesisir	1. Rata-rata pendapatan petani garam (Rp/kap/th)	16.963.611,81	28.650.000,00	168,89	17.043.750,00	114,30
	2. Rata-rata pendapatan wanita pesisir (Rp/kap/th)	2.961.073,87	5.704.000,00	192,63	5.528.000,00	171,74
	3. Rata-rata pendapatan taruna (Rp/kap/th)	4.475.418,54	5.085.000,00	113,62	4.800.000,00	100,83
Sasaran 2						
Menurunnya jumlah pelanggaran peraturan kelautan dan perikanan dan meningkatnya peran serta masyarakat pengawas dalam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan	1. Jumlah POKMASWAS aktif (kelompok)	20	23	115	20	63
	2. Jumlah operasi pengawasan (kali)	10	10	100	10	60

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2015			Realisasi Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
		Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran 3						
Meningkatnya jumlah produksi perikanan tangkap dan tercapainya peningkatan pendapatan nelayan	1. Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	306.868,21	287.732,60	93,76	270.158,30	84,72
	2. Rata-rata pendapatan nelayan (Rp/Kap/Tahun)	12.546.157,65	19.026.782,99	151,65	14.200.605,94	118,83
Sasaran 4						
Meningkatnya jumlah produksi perikanan budidaya dan tercapainya peningkatan pendapatan pembudidaya ikan	1. Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	309.949,63	420.316,01	135,61	373.291,50	108,89
	2. Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan (Rp/Kap/Tahun)	17.298.864,23	25.753.573,01	148,87	27.407.077,17	125,46
Sasaran 5						
Meningkatnya jumlah dan ragam produk olahan yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta ekspor produk perikanan dan tercapainya peningkatan angka konsumsi makan ikan di Jawa Tengah	1. Angka Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	19,59	23,64	120,67	20,92	104,65
	2. Ekspor produk perikanan (ton)	25.770,99	31.296,35	121,44	35.500,94	112,11
	3. Jumlah UPI yang dibina (UPI)	30	31	103,33	34	103,33

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2015			Realisasi Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
		Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran 6						
Meningkatnya upaya pencegahan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	1. Luasan mangrove meningkat di kawasan perikanan (Ha)	8,13	15,13	186,10	12,24	178,00
	2. Luasan terumbu karang buatan meningkat di kawasan perikanan (Ha)	5,13	5.40	105,26	5,40	83,33

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 mengacu pada Indikator Kinerja Utama di atas dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Pada akhir tahun 2015 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan diuraikan sebagai berikut :

a. Sasaran 1 : Tercapainya peningkatan pendapatan petani garam, wanita pesisir dan taruna pesisir

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3. Capaian Indikator Sasaran 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2015			Realisasi Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
		Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tercapainya peningkatan pendapatan petani garam, wanita pesisir dan taruna pesisir	1. Rata-rata pendapatan petani garam (Rp/kap/th)	16.963.611,81	28.650.000,00	168,89	17.043.750,00	114,30
	2. Rata-rata pendapatan wanita pesisir (Rp/kap/th)	2.961.073,87	5.704.000,00	192,63	5.528.000,00	171,74
	3. Rata-rata pendapatan taruna (Rp/kap/th)	4.475.418,54	5.085.000,00	113,62	4.800.000,00	100,83

Secara keseluruhan capaian indikator pada sasaran tercapainya peningkatan pendapatan petani garam, wanita pesisir dan taruna pesisir melebihi target yang ditetapkan. Indikator rata-rata pendapatan petambak garam tercapai 168,89%, rata-rata pendapatan wanita pesisir 192,63% dan rata-rata pendapatan taruna pesisir 113,62%. Seluruh capaian indikator tahun 2015 melebihi capaian pada indikator tahun 2014.

Realisasi kinerja tahun 2015 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah rata-rata pendapatan petambak garam telah tercapai 114,30%, rata-rata pendapatan wanita pesisir telah tercapai 171,74% dan rata-rata pendapatan taruna pesisir telah tercapai 100,83%.

Penyebab meningkatnya capaian kinerja Tahun 2015, apabila dianalisa lebih lanjut disebabkan :

- a) Potensi lahan garam di Jawa Tengah saat ini mencapai 7.520,80 Ha, dari jumlah tersebut yang telah dimanfaatkan seluas 6.927,50 Ha tersebar di 5 (lima) kabupaten yaitu : Kabupaten Rembang, Pati,

Brebes, Jepara dan Demak dengan jumlah petambak garam sebanyak 12.410 orang. Tahun 2015 produksi garam di Jawa Tengah mencapai 841.543,56 ton, hal ini disebabkan panjangnya musim kemarau di wilayah Indonesia pada umumnya. Dari target nasional sebesar 775.714,52 ton capaian produksi garam di Jawa Tengah mencapai 108,49%. Hal ini turut berperan dalam meningkatkan pendapatan petambak garam di Jawa Tengah, selain faktor meningkatnya kualitas garam rakyat melalui penerapan teknologi ulir filter.

- b) Rata-rata pendapatan wanita pesisir mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari target yang ditentukan tahun 2015. Sasaran pemberdayaan wanita pesisir adalah para istri nelayan dengan kegiatan pelatihan pengolahan hasil perikanan. Meningkatnya rata-rata pendapatan wanita pesisir disebabkan oleh ketersediaan bahan baku olahan ikan, disamping itu produk olahan hasil perikanan dapat terserap oleh pasar domestik.
- c) Rata-rata pendapatan taruna pesisir mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun 2014 serta target yang ditetapkan pada tahun 2015. Hal ini disebabkan terlatihnya para taruna pesisir yang telah mendapatkan beberapa bentuk pelatihan di bidang budidaya maupun pelatihan perbengkelan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 1 menggunakan APBD adalah sebesar Rp.1.516.279.500,00 atau 82,11% dari total pagu sebesar Rp.1.846.567.000,00. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 17,89% dari pagu yang ditentukan. Selain itu melalui APBN Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha terealisasi sebesar Rp.140.523.240,00 atau 46,84% dari total pagu Rp.300.000.000,00.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan pencapaian sasaran 1 tidak terlepas dari terlaksananya program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dengan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis 1, antara lain :

1. Masih rendahnya kualitas garam;
2. Jalan produksi rusak dan saluran utama yang dangkal;
3. Keterbatasan modal;
4. Lemahnya sistem kelembagaan dan keorganisasian petani garam, wanita pesisir dan taruna pesisir;

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala :

1. Pengembangan teknologi dengan penerapan Teknologi Ulir Filter dan media isolator (geo membran/geo isolator LDPE 0,2);
2. Perbaikan infrastruktur pendukung garam rakyat (jalan produksi, jembatan, saluran tambak, pintu air, gudang garam);
3. Mengaktifkan peran dari lembaga keuangan, perbankan dan koperasi untuk dapat menyalurkan kredit dengan bunga yang ringan dan mekanisme yang mudah;
4. Penguatan kelembagaan petani garam, wanita pesisir dan taruna pesisir serta sosialisasi Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait pembentukan badan hukum kelompok sebagai persyaratan penerima hibah.

b. Sasaran 2 : Menurunnya jumlah pelanggaran peraturan kelautan dan perikanan dan meningkatnya peran serta masyarakat pengawas dalam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4. Capaian Indikator Sasaran 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2015			Realisasi Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
		Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Menurunnya jumlah pelanggaran peraturan kelautan dan perikanan dan meningkatnya peran serta masyarakat pengawas dalam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan	1. Jumlah POKMASWAS aktif (kelompok)	20	23	115	20	63
	2. Jumlah operasi pengawasan (kali)	10	10	100	10	60

Secara umum capaian indikator pada sasaran menurunnya jumlah pelanggaran peraturan kelautan dan perikanan dan meningkatnya peran serta masyarakat pengawas dalam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2015, capaian Jumlah POKMASWAS aktif (kelompok) pada tahun ini lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian target pada tahun 2014.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah jumlah POKMASWAS aktif (kelompok) telah tercapai 63% dan jumlah operasi pengawasan (kali) telah tercapai 60%.

Penyebab tercapainya capaian kinerja Tahun 2015 sesuai dengan target, apabila dianalisis lebih lanjut disebabkan oleh terlaksananya

kegiatan operasi pengawasan sebanyak 10 kali di laut, sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi kelompok masyarakat pengawas sehingga menambah kesadaran masyarakat nelayan dalam menjaga sumber daya perikanan kelautan serta terlaksananya kegiatan pembinaan terhadap kelompok pokmaswas di tahun 2015 yang diikuti oleh 23 kelompok.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 2 adalah sebesar Rp.633.064.500,00 atau 93,46% dari total pagu sebesar Rp.677.387.000,00 Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 6,54% dari pagu yang ditentukan. Selain itu melalui APBN Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terealisasi sebesar Rp.892.230.715,00 atau 98,20% dari total pagu Rp.908.548.000,00.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan pencapaian sasaran 2 tidak terlepas dari terlaksananya program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian dengan kegiatan Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis 2, antara lain :

1. Masih dijumpainya pelanggaran penangkapan ikan (jalur penangkapan ikan, perijinan/dokumen, ukuran kapal dan alat tangkap);
2. Kurangnya SDM/tenaga PPNS dalam bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Jumlah pokmaswas yang aktif berperan dalam membantu pengawasan masih kurang untuk bisa mengcover seluruh wilayah Jawa Tengah,

disamping pemahaman peraturan tentang perikanan dan sarpras masih belum memadai;

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala :

1. Sosialisasi terus menerus mengenai pengendalian perijinan, pengendalian alat tangkap , pentingnya kelengkapan dokumen kapal;
2. Meningkatkan kerjasama dengan TNI AL, Polair, Satker PSDKP dan Dinas KP Kabupaten/Kota dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Meningkatkan peran serta kelompok masyarakat pengawas sumberdaya kelautan dan perikanan swadaya.

c. Sasaran 3 : Meningkatnya jumlah produksi perikanan tangkap dan tercapainya peningkatan pendapatan nelayan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.5. Capaian Indikator Sasaran 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2015			Realisasi Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
		Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya jumlah produksi perikanan tangkap dan tercapainya peningkatan pendapatan nelayan	1. Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	306.868,21	287.732,60	93,76	270.158,30	84,72
	2. Rata-rata pendapatan nelayan (Rp/Kap/Tahun)	12.546.157,65	19.026.782,99	151,65	14.200.605,94	118,83

Capaian indikator pada sasaran meningkatnya jumlah produksi perikanan tangkap tercapai sebesar 93,76% tetapi melebihi capaian tahun 2014 dan indikator peningkatan pendapatan nelayan mencapai 151,65% melebihi target tahun 2015 dan capaian tahun 2014.

Realisasi kinerja tahun 2015 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah untuk indikator produksi perikanan tangkap 84,72% dan indikator pendapatan nelayan 118,83%.

Belum tercapainya indikator produksi perikanan tangkap disebabkan oleh beberapa faktor antara lain belum masuknya data produksi dari beberapa Kabupaten/Kota serta terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang menyebabkan sebagian besar kapal penangkapan ikan di Jawa Tengah yang menggunakan alat tangkap cantrang tidak melaut. Peningkatan rata-rata pendapatan nelayan meningkat dibandingkan tahun 2014 antara lain disebabkan peningkatan produksi perikanan tangkap, pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi nelayan berupa alat bantu penangkapan ikan (GPS, Fish finder), pembangunan fish apartemen/rumah ikan dan bantuan coolbox untuk meningkatkan kualitas hasil tangkapan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 3 adalah sebesar Rp.10.067.223.182,00 atau 97,48% dari total pagu sebesar Rp.10.327.774.000,00. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,52% dari pagu yang ditentukan. Selain itu melalui anggaran APBN (Dekonsentrasi) Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap terealisasi sebesar Rp.3.253.499.650,00 dari total pagu Rp.6.491.597.000,00. Sedangkan anggaran APBN (Tugas Pembantuan) pada program yang sama terealisasi sebesar Rp.1.065.981.300,00 atau 60% dari total pagu sebesar Rp.1.776.664.000,00.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan pencapaian sasaran 3 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan kegiatan :

1. Kegiatan Optimalisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan;
2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Hasil Tangkapan;
3. Kegiatan Pengembangan Sistem Kerja Pelabuhan Perikanan Pantai Jawa Tengah;
4. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Tasikagung;
5. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Bajomulyo;
6. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Karimunjawa;
7. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Morodemak;
8. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Tawang;
9. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Klidanglor;
10. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Wonokerto;
11. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Asemdayong;
12. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Tegalsari;
13. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan;
14. Kegiatan Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap;
15. Kegiatan Revitalisasi Perikanan Tangkap dan Statistik Perikanan Tangkap.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis 3, antara lain :

1. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya terkait persyaratan bantuan bagi kelompok nelayan yang berbadan hukum;
2. Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) Dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia menyebabkan sebagian besar kapal perikanan di Jawa Tengah tidak melaut;
3. Terjadinya *Illegal Unreported Unregulated Fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan yang ilegal, melanggar aturan penggunaan alat tangkap (ukuran mata jaring kecil, panjang jaring, alat bantu penangkapan dan melanggar jalur penangkapan);
4. Pendangkalan/Sedimentasi alur pelayaran di Pelabuhan Perikanan Pantai sehingga mengganggu keluar masuk kapal;
5. Tingginya biaya operasional nelayan terutama harga BBM;
6. Kurangnya modal untuk operasional penangkapan ikan;

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala :

1. Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya terkait persyaratan bantuan serta mendorong kelompok nelayan agar memiliki badan hukum;
2. Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.02/PERMEN-KP/2015 agar nelayan beralih menggunakan alat tangkap ramah lingkungan;
3. Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor NOMOR 18/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

4. Pengerukan sedimen secara rutin setidaknya setiap 3 tahun sekali pada alur pelayaran dan kolam pelabuhan;
5. Pengendalian distribusi BBM bersubsidi bagi nelayan dengan adanya kartu BBM nelayan;
6. Memfasilitasi petugas Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) sebagai pendamping bagi nelayan yang akan mengakses permodalan ke bank.
7. Memfasilitasi pertemuan akses permodalan dengan mengundang perbankan untuk menjembatani komunikasi antara bank dengan nelayan.

d. Sasaran 4 : Meningkatnya jumlah produksi perikanan budidaya dan tercapainya peningkatan pendapatan pembudidaya ikan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.6. Capaian Indikator Sasaran 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2015			Realisasi Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
		Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya jumlah produksi perikanan budidaya dan tercapainya peningkatan pendapatan pembudidaya ikan	1. Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	309.949,63	420.316,01	135,61	373.291,50	108,89
	2. Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan (Rp/Kap/Tahun)	17.298.864,23	25.753.573,01	148,87	27.407.077,17	125,46

Keseluruhan capaian indikator pada sasaran meningkatnya jumlah produksi perikanan budidaya dan tercapainya peningkatan pendapatan pembudidaya ikan melebihi target yang ditetapkan tahun 2015.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah untuk indikator produksi perikanan budidaya 108,89% dan indikator rata-rata pendapatan pembudidaya 125,46%.

Penyebab capaian kinerja Tahun 2015 apabila dianalisis lebih lanjut disebabkan oleh :

- a) Penggunaan induk dan benih unggul melalui program GAUL (Gerakan Penggunaan Induk dan benih Unggul) dalam proses produksi pembudidayaan ikan, yang dibarengi dengan peningkatan jumlah unit perbenihan ikan yang bersertifikat sebanyak 51 unit.
- b) Pengendalian hama penyakit ikan yang cukup berhasil yang ditandai selama 2015 tidak muncul penyakit endemis, hal ini dimungkinkan karena penggunaan vaksinasi ikan (GERVIKAN/ Gerakan Vaksinasi Ikan), vaksin yang digunakan di Jawa Tengah antara lain : strepto vac, hidro vac dan KV3 dan lain sebagainya.
- c) Pelaksanaan sertifikasi penerapan Cara Budidaya Ikan yang baik (CBIB) pada unit produksi yang semakin berkembang yaitu sebesar 333 unit.
- d) Dengan semakin berkembangnya bermacam-macam paket teknologi perikanan budidaya antara lain teknologi Bioflock, teknologi NWS (Natural Water System) untuk budidaya ikan air tawar, teknologi double screen pada budidaya udang dan juga standarisasi benih, sarana produksi yang semakin baik menjadikan lebih efisien dalam penggunaan sumberdaya perikanan. Sebagai contoh adalah perhitungan Food Conversion Ratio (FCR) adalah konversi pakan yang dirubah menjadi daging ikan, yang sebelumnya rata-rata 1,2 menjadi 0,8-1,0. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan sumberdaya perikanan semakin efisien.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 4 adalah sebesar Rp.12.324.425.950,00 atau 92,19% dari total pagu sebesar Rp.13.368.308.000,00. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,81% dari pagu yang ditentukan. Selain itu melalui anggaran APBN (Dekonsentrasi) Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya terealisasi sebesar Rp.2.266.006.300,00 atau 59,97% dari total pagu Rp.3.778.796.000,00. Sedangkan anggaran APBN (Tugas Pembantuan) pada program yang sama terealisasi sebesar Rp.2.141.271.000,00 atau 88,98% dari total pagu sebesar Rp.2.406.467.000,00.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan pencapaian sasaran 4 tidak terlepas dari dilaksanakan program Pengembangan Perikanan Budidaya dengan kegiatan :

1. Kegiatan Optimalisasi dan Pengembangan Karantina dan Kesehatan Ikan;
2. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar;
3. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau dan Laut;
4. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan;
5. Kegiatan Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Ikan;
6. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Perbenihan Ikan ;
7. Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya Air Tawar;
8. Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya Air Payau.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis 4, antara lain :

1. Wawasan dan pengetahuan SDM pembudidaya ikan dalam pengembangan dan pengelolaan usaha masih terbatas;
2. Lemahnya akses permodalan pembudidaya ikan
3. Ketersediaan benih ikan unggul yang terbatas,
4. Penggunaan bahan residu antibiotik;
5. Terjadinya musim kemarau yang panjang;
6. Fluktuasi harga sarana produksi (pakan, pupuk, obat-obatan) yang mempengaruhi biaya produksi di lapangan.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala :

1. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan para pembudidaya ikan melalui kegiatan pelatihan, magang, adopsi teknologi dan percontohan;
2. Fasilitasi pembiayaan pembudidayaan ikan melalui lembaga keuangan;
3. Pengembangan induk ikan unggul dan sertifikasi benih ikan unggul;
4. Monitoring/pembinaan/pemantauan penggunaan bahan residu dalam kegiatan perikanan budidaya serta pengelolaan kesehatan lingkungan, penguatan permodalan dan meningkatkan sistem penyuluhan baik sarana/prasarana dan SDM penyuluh di lapangan;
5. Penyuluhan kepada pembudidaya ikan untuk mengatur musim tebar dan pengaturan kepadatan populasi ikan;
6. Pengembangan pakan ikan mandiri/pakan ikan lokal dengan memanfaatkan bahan baku yang banyak tersedia di lapangan.

e. Sasaran 5 : Meningkatkan jumlah dan ragam produk olahan yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta ekspor produk perikanan dan tercapainya peningkatan konsumsi makan ikan di Jawa Tengah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 5, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.7. Capaian Indikator Sasaran 5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2015			Realisasi Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
		Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya jumlah dan ragam produk olahan yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta ekspor produk perikanan dan tercapainya peningkatan angka konsumsi makan ikan di Jawa Tengah	1. Angka Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	19,59	23,64	120,67	20,92	104,65
	2. Ekspor produk perikanan (ton)	25.770,99	31.296,35	121,44	35.500,94	112,11
	3. Jumlah UPI yang dibina (UPI)	30	31	103,33	34	103,33

Keseluruhan indikator pada sasaran ini melebihi dari target yang ditetapkan tahun 2015. Dibandingkan dengan capaian tahun 2014, realisasi volume ekspor produk perikanan mengalami penurunan dari 35.500,94 ton menjadi 31.296,35 ton. Hal ini disebabkan berkurangnya ketersediaan bahan baku ikan yang sebagian besar merupakan hasil tangkapan laut.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah untuk indikator tingkat konsumsi ikan 104,65%, ekspor produk perikanan 112,11% dan jumlah UPI yang dibina 103,33%

Penyebab capaian kinerja Tahun 2015 apabila dianalisis lebih lanjut disebabkan oleh :

- a) Angka Konsumsi Ikan (AKI) Tahun 2015 sebesar 23,64 kg/kapita/tahun dengan capaian 120,67% dari target yang ditetapkan yakni 19,59 kg/kapita/tahun. Perhitungan angka konsumsi ikan ini menggunakan metode pendekatan konsumsi. Peningkatan konsumsi ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi menu ikan yang didukung oleh perkembangan jumlah restoran dan rumah makan yang menyajikan menu komoditi ikan serta hotel dan penginapan yang menyajikan menu makanan ikan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan Angka Konsumsi Ikan melalui kegiatan Gemar Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) bagi siswi-siswi Sekolah Dasar maupun ibu-ibu Tim Penggerak PKK serta adanya kegiatan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan). Forikan yang saat ini sudah mencapai tingkat Kelurahan berperan dalam melakukan sosialisasi pentingnya konsumsi ikan bagi kesehatan keluarga dan kecerdasan anak;
- b) Tercapainya target volume ekspor produk perikanan disebabkan oleh bertambahnya komoditi olahan perikanan dan kelautan yang diekspor dan juga bertambahnya negara tujuan pasar ekspor (Eropa, USA, Australia dan Asia);
- c) Pembinaan terhadap Unit Pengolah Ikan di Jawa Tengah dilakukan terhadap seluruh UPI yang aktif melakukan ekspor. Tahun 2015 terdapat 31 UPI aktif di Jawa Tengah. Pembinaan terhadap UPI dilaksanakan dalam rangka menjamin terlaksananya penerapan GMP dan SSOP sebagai persyaratan pelaksanaan ekspor produk hasil perikanan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 4 adalah sebesar Rp.8.623.201.508,00 atau 95,71% dari total pagu sebesar Rp.9.009.781.000,00. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,29% dari pagu yang ditentukan. Selain itu melalui

anggaran APBN (Dekonsentrasi) Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan terealisasi anggaran sebesar Rp. 2.169.618.900,00 atau 85,60% dari total pagu total sebesar Rp.2.534.475.000,00. Sedangkan anggaran APBN (Tugas Pembantuan) pada program yang sama terealisasi sebesar Rp.1.135.117.238,00 atau sebesar Rp.1.152.950.000,00.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan pencapaian sasaran 5 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan dengan kegiatan :

1. Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan;
2. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan LPPMHP Pekalongan;
3. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan LPPMHP Cilacap;
4. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Mutu Usaha Perikanan;
5. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan LPPMHP Semarang;
6. Kegiatan Pengembangan Kawasan Perikanan;
7. Kegiatan Pengembangan Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Program Kegiatan Kelautan dan Perikanan;
8. Kegiatan Peningkatan Perluasan Usaha dan Koordinasi Kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis 5, antara lain :

1. Jaminan mutu keamanan pangan produk UMKM pengolahan hasil perikanan masih belum memenuhi standar GMP dan SSOP;
2. Ketersediaan bahan baku industri pengolahan hasil perikanan masih bergantung pada kondisi cuaca;
3. Penerapan Sanitasi dan higienis pada los ikan pasar tradisional masih perlu pembinaan;

4. Angka Konsumsi Ikan (AKI) Jawa Tengah masih dibawah AKI nasional;

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala :

1. Pembinaan penerapan sanitasi dan higienis pada UMKM pengolahan hasil perikanan;
2. Pengembangan jaringan distribusi logistik ikan di wilayah penghasil ikan;
3. Pembinaan pasar dengan menerapkan cara pengelolaan pasar ikan yang baik;
4. Meningkatkan kampanye pentingnya mengkonsumsi makan ikan melalui Kampanye Gemarikan dan FORIKAN.

f. Sasaran 6 : Meningkatnya upaya pencegahan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 6, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.8. Capaian Indikator Sasaran 6

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2015			Realisasi Tahun 2014	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
		Target	Realisasi	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya upaya pencegahan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	1. Luasan mangrove meningkat di kawasan perikanan (Ha)	8,13	15,13	186,10	12,24	178,00
	2. Luasan terumbu karang buatan meningkat di kawasan perikanan (Ha)	5,13	5.40	105,26	5,40	83,33

Seluruh capaian indikator pada sasaran meningkatnya upaya pencegahan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melebihi target.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah untuk indikator luasan mangrove di kawasan perikanan mencapai 178,00% dan luasan terumbu karang buatan mencapai 83,33%.

Tercapainya target capaian kinerja Tahun 2015 apabila dianalisis lebih lanjut disebabkan oleh terlaksananya kegiatan penanaman mangrove pada tahun 2015 dengan total penanaman mangrove sebanyak 530.000 batang dengan luasan 15,13 Ha melebihi target tahun 2015 sebesar 8,13 Ha, serta melebihi capaian di tahun 2014 sebesar 12,24 Ha. Sedangkan luas penanaman terumbu karang buatan sebanyak 60 unit pada tahun 2015 terlaksana di Karang Jeruk Kabupaten Tegal, Pulau Panjang Kabupaten Jepara dan Karang Jahe Kabupaten Rembang sesuai dengan target tahun 2015 sebanyak 60 unit/5.40 Ha.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 6 adalah sebesar Rp. 2.530.114.100,00 atau 97,23% dari total pagu sebesar Rp. 2.602.130.000,00. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,73% dari pagu yang ditentukan. Selain itu melalui APBN Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis dan Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Lautan sebesar Rp. 873.705.000,00 atau 91,01% dari total pagu 2 (dua) kegiatan tersebut sebesar Rp. 960.000.000,00.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan pencapaian sasaran 6 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan kegiatan :

1. Kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
2. Kegiatan Rehabilitasi Habitat Vital.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis 6, antara lain :

1. Abrasi yang terjadi tidak lepas dari aktivitas pembangunan yang berdampak pada perubahan pola arus dan keseimbangan transport sedimen pada pantai yang berdekatan dalam satu sistem sedimen sel;
2. Penurunan kualitas lingkungan dan keanekaragaman hayati akibat kegiatan reklamasi pantai sebagaimana terjadi di beberapa kawasan pesisir yang diperkirakan dapat mengubah struktur ekologi komunitas biota laut bahkan dapat menurunkan keanekaragaman hayati perairan;
3. Perubahan kebijakan kewenangan provinsi dalam pengelolaan wilayah laut menjadi 0-12 mil

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala :

1. Penangan laju abrasi yang sangat cepat dan begitu merusak tidak bisa ditangani hanya dengan rehabilitasi mangrove, sehingga dibutuhkan keterlibatan, keterpaduan, dan harmonisasi lintas sektor, seperti pembangunan breakwater, sabuk pantai, rehabilitasi mangrove;
2. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu melalui integrasi perencanaan sektor secara horisontal yaitu mengintegrasikan perencanaan dari sektor pertanian dan konservasi yang berada di DAS hulu, sektor perikanan baik budidaya tambak udang dan ikan maupun perikanan tangkap, pariwisata alam dan bahari, perhubungan laut , industri maritim, pertambangan lepas pantai, konservasi laut dan pengembangan kota. Selain itu integrasi perencanaan sektor secara vertikal meliputi kebijakan operasional dan perencanaan mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai Nasional;

3. Dilakukan kajian sumberdaya pesisir sebagai pendukung penyusunan naskah akademik dalam rangka revisi Perda No. 4/2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, pada tahun anggaran 2015, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp.126.887.270.000,00. Anggaran tersebut bersumber dari Belanja Langsung APBD sebesar Rp.58.042.032.000,00; Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.48.531.545.000,00 dan APBN sebesar Rp.20.313.693.000,00, secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

Belanja Langsung APBD

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp.7.179.920,00
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp.35.774.913.000,00
3. Belanja Modal, sebesar Rp.15.087.199.000,00

Belanja Tidak Langsung APBD

1. Gaji dan Tunjangan, sebesar Rp.21.418.345.000,00
2. Tambahan Penghasilan PNS, sebesar Rp.27.113.200.000,00

Penggunaan APBD tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Sasaran

Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tercapainya peningkatan pendapatan petani garam, wanita pesisir dan taruna pesisir	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	1.846.567.000	1.516.279.500	82,11

Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Menurunnya jumlah pelanggaran peraturan kelautan dan perikanan dan meningkatnya peran serta masyarakat pengawas dalam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian	677.387.000	633.064.500	93,46
Meningkatnya jumlah produksi perikanan tangkap dan tercapainya peningkatan pendapatan nelayan	Pengembangan Perikanan Tangkap	10.327.774.000	10.067.223.182	97,48
Meningkatnya jumlah produksi perikanan budidaya dan tercapainya peningkatan pendapatan pembudidaya ikan	Pengembangan Perikanan Budidaya	13.368.308.000	12.324.425.950	92,19
Meningkatnya jumlah dan ragam produk olahan yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	9.009.781.000	8.623.201.508	95,71

Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
serta ekspor produk perikanan dan tercapainya peningkatan konsumsi makan ikan di Jawa Tengah				
Meningkatnya upaya pencegahan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	2.602.130.000	2.530.114.100	97,23

Dari total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.58.042.032.000,00, digunakan untuk membiayai 11 Program dan 91 Kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 sebesar 92,60% atau terealisasi sebesar Rp.53.749.039.237,00.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang kelautan dan perikanan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **sangat baik** dengan rata-rata capaian keseluruhan indikator sebesar 131,94%. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Sasaran 1 Tercapainya peningkatan pendapatan petani garam, wanita pesisir dan taruna pesisir dicapai 158,38%;
2. Sasaran 2 Menurunnya jumlah pelanggaran peraturan kelautan dan perikanan dan meningkatnya peran serta masyarakat pengawas dalam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dicapai 107,50%.
3. Sasaran 3 Meningkatnya jumlah produksi perikanan tangkap dan tercapainya peningkatan pendapatan nelayan dicapai 122,71%.
4. Sasaran 4 Meningkatnya jumlah produksi perikanan budidaya dan tercapainya peningkatan pendapatan pembudidaya ikan dicapai 142,24%
5. Sasaran 5 Meningkatnya jumlah dan ragam produk olahan yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta ekspor produk perikanan dan tercapainya peningkatan angka konsumsi makan ikan di Jawa Tengah dicapai 115,15%.
6. Sasaran 6 Meningkatnya upaya pencegahan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dicapai 145,68%.

Keberhasilan pencapaian target kinerja indikator di atas diiringi dengan capaian prestasi tingkat nasional dengan meraih Juara Umum Adibakti Mina Bahari 2015 setelah menjuarai berbagai kategori penilaian, antara lain :

1. Juara 1 Adibakti Mina Bahari 2015 Kategori Pokdakan Nila/Mas/Gurame Kabupaten Banyumas (Ulam Sari);
2. Juara 1 Adibakti Mina Bahari Pelopor 2015 Kategori Pendamping Permodalan Perikanan Tangkap Teladan -Mitra Usaha Perikanan Tangkap- (Abdul Jamil);
3. Juara 1 Adibakti Mina Bahari Pelopor 2015 Kategori Perbankan Teladan -Mitra Usaha Perikanan Tangkap- (BRI Cabang Brebes);
4. Juara 1 Adibakti Mina Bahari Pelopor 2015 Kategori Pelabuhan Perikanan Teladan (PPP Morodemak);
5. Juara 1 Adibakti Mina Bahari 2015 Kategori Pokdakan Udang Kabupaten Purworejo (Mina Loka Jaya);
6. Juara 1 Adibakti Mina Bahari 2015 Kategori Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT) Kabupaten Banyumas (Wijaya Kusuma);
7. Juara 1 Adibakti Mina Bahari 2015 Kategori Kelembagaan Posikandu Kabupaten Pati (DKP Pati);
8. Juara 1 Adibakti Mina Bahari 2015 Kategori UKM Pengolahan Hasil Perikanan Terbaik Kategori Skala Kecil Kabupaten Brebes (Murwati Murwat (Mutiar Gading));
9. Juara 1 Adibakti Mina Bahari 2015 Kategori Pemerintah Daerah Pendukung Pengembangan SDM KP (Hj. Siti Masita S);
10. Juara 1 Adibakti Mina Bahari 2015 Kategori Perikanan Mandiri Terbaik (Hadis).
11. Juara 2 Adibakti Mina Bahari 2015 Kategori Kelembagaan Unit Pelayanan Pengembangan Kabupaten Grobogan (Mitra Usaha Mina);
12. Juara 2 Adibakti Mina Bahari 2015 Kategori Pokdakan Nila/Mas/Gurame Kabupaten Temanggung (Mina Papilion);
13. Juara 2 Adibakti Mina Bahari 2015 Kategori Pokdakan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) Kabupaten Banyumas (Pamuji Inggil);
14. Juara 2 Adibakti Mina Bahari 2015 Kategori Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT) Kabupaten Kendal (Desa Wonorejo);
15. Juara 3 Adibakti Mina Bahari 2015 Kategori Wirausaha Perikanan Tangkap Teladan Kabupaten Batang (H. Nur Abadi);

16. Juara 3 Adibakti Mina Bahari 2015 Kategori Pokdakan Rumput Laut Kabupaten Brebes (Kali Crucuk);
17. Adibakti Mina Bahari 2015 Kategori Gemarikan-Restoran/ Rumah Makan (Restoran Gulai Kepala Ikan 'Mas Agus' Solo);
18. Juara 3 Adibakti Mina Bahari 2015 Kategori Konsultan Keuangan Mitra Bank Sektor Kelautan dan Perikanan Teladan (Adi Nugroho);

B. SARAN

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang adalah mengimplementasi 3 dari 11 program unggulan Gubernur Jawa Tengah yaitu mewujudkan desa mandiri, pembangunan infrastruktur dan pembangunan lingkungan Jawa Tengah ijo royo-royo melalui peningkatan program dan kegiatan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan fokus pada pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

Pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah tahun anggaran 2015, didasarkan komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang dilandasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018. Secara ringkas seluruh capaian kinerja pada tahun 2015 telah memberikan arah bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kinerjanya pada masa selanjutnya secara berkesinambungan. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja 2015, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan di masa selanjutnya sebagai berikut:

1. Menjadikan hasil kinerja tahun 2015 sebagai langkah nyata untuk perbaikan perencanaan dan kinerja tahun 2016 dengan mengantisipasi kegagalan pencapaian target tahun 2016 dan mempertahankan keberhasilan yang diraih di tahun 2015;
2. Melakukan konsolidasi organisasi secara internal dalam rangka meningkatkan kesadaran dan komitmen jajaran terhadap tugas dan fungsi pelayanan umum;
3. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;

4. Mekanisme pengumpulan data kinerja terus ditingkatkan secara berkesinambungan sehingga pencapaian kinerja dapat dimonitor secara berkala dan didukung dengan informasi yang lebih akurat.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2015 untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Semarang, Februari 2016

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Ir. LALU M. SYAFRIADI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610707 199003 1 006

LAMPIRAN